

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. *Multikolinearitas*

Menurut Basuki dan Yuliadi (2015) *multikolinearitas* terjadi apabila kolerasi antar variabelnya lebih besar dari pada 0,8.

Tabel 5.1
Corellation Test

Variable	LOGPEND	LOGPDRB	LOGANG
LOGPEND	1	0,653028	0,424027
LOGPDRB	0,653028	1	0,867505
LOGANG	0,424027	0,867505	1

Sumber: Lampiran, data diolah

Berdasarkan hasil uji korelasi yang telah dilakukan pada tabel 5.1 dapat diketahui bahwa nilai uji korelasi pada variable LOGANG lebih besar dari 0,8. Dapat dikatakan bahwa data penelitian ini mengandung *multikolinearitas*.

Menurut Gujarati (2006) untuk mengatasi masalah *multikolinearitas* perlu dilakukan transformasi diferensi pada variabel yang mengandung *multikolinearitas*. Berdasarkan hasil LOGANG masih mengandung *multikolinearitas* maka dari itu perlu dilakukan transformasi diferensi menjadi DANG.

Tabel 5.2

Corellation Test

Variable	LOGPEND	LOGPDRB	DANG
LOGPEND	1	0,650184	0,064879
LOGPDRB	0,650184	1	0,186082
DANG	0,064879	0,186082	1

Sumber: Lampiran, data diolah

Berdasarkan hasil uji korelasi yang telah dilakukan pada tabel 5.2 dapat diketahui bahwa nilai uji korelasi pada variabel independen lebih kecil dari 0,8. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini pada variabel independen terbebas dari *multikolinearitas*.

2. *Heteroskedastisitas*

Uji *heteroskedastisitas* pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Prosedur uji *glejser* dilakukan dengan mengabsolutkan residu dari hasil regresi yang telah dilakukan. Menurut Basuki dan Yuliadi (2014) asumsi *non-heteroskedastisitas* terpenuhi apabila output menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai *absolute residual* ($> 0,05$).

Tabel 5.3

Glejser Test

Variable	Prob.
C	0.8574
LOGPEND	0.6622
LOGPDRB	0.0637
LOGANG	0.2283

Sumber: Lampiran, data diolah

Berdasarkan hasil uji *heteroskedastisitas* yang telah dilakukan pada tabel 5.3 dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Uji *glejser* pada penelitian ini lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan penelitian ini terbebas dari *heteroskedastisitas*.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Chow

Dalam melakukan estimasi pada data panel, tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan model estimasi yang tepat pada data panel. Salah satu metode dalam menentukan model estimasi yang tepat pada data panel adalah uji chow. Uji chow digunakan sebagai salah satu teknik memilih model estimasi *Pooled* dan H_1 adalah model estimasi *Fixed Effect*. Jika hasil probabilitas uji chow lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima yang artinya model yang tepat untuk digunakan dalam analisis data panel adalah model *polled*. Dan jika hasil probabilitas Uji Chow lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, yang artinya model estimasi yang tepat untuk data panel adalah *Fixed Effect*. Berikut hasil uji chow dalam penelitian ini:

Tabel 5.4

Hasil Chow Test

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	5,329615	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	129,335864	0,0000

Sumber: Lampiran, data diolah

Berdasarkan hasil uji chow yang telah dilakukan pada tabel 5.4 dapat diketahui bahwa nilai *Prob. Chi-Square* dari hasil uji chow lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), yaitu $0,0000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak atau dengan kata lain model estimasi yang tepat untuk analisis pada data panel dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect*.

2. Koefisien determinasi (*adjusted R²*)

Jika dilihat dari hasil uji R^2 diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) sebesar 0,806573. Nilai koefisien determinasi bernilai positif, menunjukkan bahwa 80,65% variasi dari Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel di dalam model, sedangkan 19,35% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

2. Hasil analisis *panel least square fixed effect*.

Hasil estimasi dari pengolahan data menggunakan *Panel Least Square* dengan *Fixed effect*:

Tabel 5.5

Hasil Analisis *Panel Least Square Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5,899209	15,10287	-0.390602	0,6967
LOGPEND	0,327324	0,089994	3.637166	0,0004
LOGPDRB	3,373913	0,721483	4.676357	0,0000
LOGANG	-3,357476	1,571723	-2.136176	0,0343

Sumber: Lampiran, data diolah

C. Pembahasan (Interpretasi)

Berdasarkan hasil estimasi data pada tabel 5.5 menjelaskan bahwa pada variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dengan tingkat signifikansi sebesar 5% bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 1% akan menyebabkan kemiskinan/jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,32%. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan adanya pengaruh negatif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan kemiskinan/jumlah penduduk miskin di setiap provinsi Indonesia. Hubungan antara variabel kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam hasil estimasi data ternyata tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. Menurut Suparmoko (2002) bentuk investasi langsung untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yaitu pengeluaran pemerintah. Berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2009 dilanjutkan dengan No.15 Tahun 2010, pemerintah mengembangkan tiga kelompok program kemiskinan, dimana secara operasional, program kegiatan pengentasan kemiskinan terdiri atas kluster-kluster tertentu dengan program yang berbeda. Kluster I berorientasi Bantuan Sosial Terpadu berbasis Keluarga, Kluster II berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dan Kluster III berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan termasuk Kluster I yaitu fokus dalam pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan bertujuan untuk memperlancar dan meratakan proses penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut akan mempermudah upaya peningkatan

sumber daya manusia yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, semakin tingginya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan maka tingkat kemiskinan/jumlah penduduk miskin akan semakin rendah.

Hasil estimasi data tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dikarenakan pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan untuk keluarga miskin belum efektif dan efisien. Penemuan ini sejalan dengan laporan “Tinjauan Belanja Publik di Sektor Pendidikan (*Education Public Expenditure Review*)”, yang dirilis oleh Bank Dunia tahun 2013 dalam Kemdikbud (2016) menyatakan bahwa anggaran fungsi pendidikan di Indonesia yaitu 20% dari APBN ternyata belum efektif dalam meningkatkan dunia pendidikan. Alokasi anggaran yang cukup besar digunakan untuk membayar gaji guru dan program sertifikasi guru yang dari tahun ketahun meningkat tajam seiring dengan peningkatan jumlah guru secara keseluruhan. Meski perkembangan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan salah satu program ideal bagi peningkatan akses pendidikan untuk siswa dari keluarga miskin, akan tetapi dalam implementasinya program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Target sasaran yang ditetapkan masih banyak yang tidak sesuai karena sebagian besar BSM masih diterima oleh siswa dari rumah tangga mampu. Distribusi BSM untuk rumah tangga miskin dan rentan untuk tingkat sekolah dasar (SD) hanya sebesar 4% bahkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) jangkauannya bisa lebih rendah lagi. Secara keseluruhan distribusi BSM mengalir kepada 60% siswa mampu dan 40% lainnya diterima siswa miskin. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa sekitar 30% siswa miskin mendapatkan alokasi dana kurang dari dua kali bagian yang diperoleh 30% siswa

terkaya. Selain tingkat ketepatan sasaran yang tinggi, beberapa penyebab lain kurang maksimalnya program BSM adalah karena belum adanya kepastian atas kelanjutan subsidi antar jenjang pendidikan bagi siswa penerima BSM, serta waktu atas biaya tersebut dibutuhkan oleh siswa, dengan demikian ketepatan waktu penyaluran BSM masih perlu di perbaiki (TNP2K dalam Zulyanto, 2017).

TNP2K dalam Zulyanto (2017), berdasarkan laporan pemantauan lapangan dana pendidikan yang dilakukan Tim Pencegahan KPK pada tahun 2014, terdapat empat permasalahan mendasar dalam pengelolaan anggaran pendidikan yaitu lemahnya pengendalian internal, lemahnya sistem administrasi (data yang kurang memadai), kekosongan pengawasan dan lemahnya kontrol publik maupun sosial. Salah satu contohnya adalah banyak sekali Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang disalah gunakan. BOS merupakan dana pendidikan yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, tujuan khusus BOS adalah membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri SMP/SMPLB/SMP/SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah; membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta; mengurangi angka putus sekolah (SMA/SMK); meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) siswa SMA/SMK. Potensi kebocoran dana BOS meliputi:

- a) Manipulasi jumlah siswa penerima BOS yang bertujuan untuk mendapatkan dana BOS yang lebih besar dari jumlah siswa, dengan demikian dana tersebut

tidak ada realisasinya dan diambil oleh oknum sekolah tersebut untuk pribadi (Kemdikbud, 2016).

- b) Adanya penyimpanan anggaran dana BOS di Kas Umum Daerah (KUD) dan ketika melakukan transfer dari KUD ke rekening sekolah dimungkinkan adanya kuasa dinas guna meminta bagian (kisaran variatif) 10%-50% dari total BOS dengan modus meminta bayaran administrasi (Kemdikbud, 2016).
- c) Laporan tahunan yang sering terlambat dan bahkan terjadi manipulasi laporan (Kemdikbud, 2016)

Hasil analisis di atas menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengakibatkan kemiskinan meningkat, hasil estimasi data dalam penelitian ini ternyata sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Rejekingsih (2013) mereka menyatakan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi kemiskinan hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah tidak ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, maka pengentasan kemiskinan tidak akan terwujud. Secara logis hal ini bisa dikaitkan dengan jangkauan pelayanan pendidikan kepada masyarakat miskin, di mana jika pelayanan pendidikan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin semakin tidak terjangkau, maka kemiskinan akan terus meningkat. Selain itu Wibowo (2014) dalam penelitiannya juga mendukung hasil penelitian ini, Ia menyatakan bahwa hasil perhitungan tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikembangkan. Pembiayaan pendidikan bertujuan untuk memperlancar dan meratakan proses penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut akan mempermudah upaya peningkatan

sumber daya manusia yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, semakin tingginya pembiayaan pendidikan maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah.

Pada variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan tingkat signifikansi sebesar 5% bahwa setiap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 1% akan menyebabkan kemiskinan/jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,37%. Nilai koefisien yang positif menunjukkan adanya pengaruh positif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kemiskinan/jumlah penduduk miskin di setiap provinsi Indonesia. Hubungan antara variabel kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto dalam hasil estimasi data ternyata sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. Artinya apabila PDRB suatu daerah mengalami peningkatan maka kemiskinan akan mengalami peningkatan dan sebaliknya, jika PDRB mengalami penurunan maka kemiskinan akan menurun. Menurut Sukirno (2011), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Hasil estimasi data di atas menyatakan bahwa peningkatan PDRB mengakibatkan kemiskinan meningkat, Purbadharmaja (2013) dalam penelitiannya juga mendukung hasil ini dengan menyatakan bahwa PDRB belum bisa di simpulkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, karena disebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah.

Pada variabel angkatan kerja, dengan tingkat signifikansi sebesar 5% bahwa setiap kenaikan angkatan kerja sebesar 1% akan menyebabkan kemiskinan/jumlah penduduk miskin menurun sebesar 3,35%. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan adanya pengaruh negatif angkatan kerja dengan kemiskinan/jumlah penduduk miskin di setiap provinsi Indonesia. Hubungan antara variabel kemiskinan dan angkatan kerja dalam hasil estimasi data ternyata sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan angkatan kerja penuh dapat terwujud, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai sehingga dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2004). Apabila pendapatan masyarakat mencapai maksimum, dan tingkat penggunaan angkatan kerja penuh dapat terwujud akan dapat mengurangi atau menurunkan kemiskinan/jumlah penduduk miskin.

Hasil estimasi data menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja terhadap kemiskinan negatif dan signifikan. Hasil ini sejalan dengan teori Todaro (1978) menurut teori ini salah satu mekanisme yang utama dalam mengurangi kemiskinan

adalah menanggulangi masalah tenaga kerja. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa tingginya angkatan kerja memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, dimana tingginya partisipasi angkatan kerja akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan penelitian ini, Widyasworo (2014) menyatakan bahwa partisipasi angkatan kerja wanita mempunyai pengaruh paling dominan terhadap tingkat kemiskinan dengan sifat hubungan negatif. Dimana hal ini dapat dijelaskan bahwa partisipasi angkatan kerja wanita sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi angka partisipasi kerja wanita, maka pendapatan rumah tangga miskin tersebut akan semakin meningkat pula, yang kemudian akan meningkatkan kesejahteraan keluarga karena kebutuhan dasar hidupnya mampu dipenuhi dan ini menandakan bahwa mereka pelan-pelan meninggalkan lingkaran kemiskinan.